

4. Rumah Sakit Paru Jember
 5. Rumah Sakit Paru Batu
 6. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya
 7. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun
 8. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan
 9. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya
 10. UPT Matera Medika Batu
 11. UPT Akademi Gizi Surabaya
 12. UPT Akademi Keperawatan Madiun
 13. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang 73
- b. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;

- 3) Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya di Jl. Gayung Kebonsari Timur No. 47 Surabaya
- 4) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat di Murnajati Lawang dan Bendul Merisi Surabaya
- 5) RS Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto, Jl. Sumber Glagah Pacet, Mojokerto
- 6) RS Khusus Kusta Kediri, Jl. Veteran No. 12 Kediri
- 7) RS Khusus Paru Batu, Jl. A. Yani No. 10-13 Batu
- 8) RS Khusus Paru Dungus, Jl. Dungus Wungu Madiun
- 9) RS Khusus Paru Jember Jl. Nusa Indah No. 28 Jember
- 10) Akademi Keperawatan Soedono Madiun, Jl. Imam Bonjol No. 1 Madiun
- 11) BP4 Pamekasan, Jl. Bonorogo No. 17 Pamekasan
- 12) UPT Matera Medika, Jl Lahor 87 Batu
- 13) BP4 Madiun, Jl. Yos Sudarso 112 B Madiun

Kendaraan Dinas sebanyak 134 buah terdiri dari 82 buah kendaraan roda dua dan 52 kendaraan roda empat.

2008 sebesar Rp. 213 M. Sebagian anggaran tersebut berupa dana dekonsentrasi yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan di Provinsi selain mendukung Kabupaten/Kota utamanya kegiatan untuk menurunkan AKI dan AKB. Sebagian lagi berupa dana tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh RS Provinsi dan RS Kabupaten/Kota.

Bantuan luar negeri selain mendapatkan dari Unicef dan bantuan USAID untuk program kesehatan ibu dan anak, juga bantuan dari proyek KNCV, NLR, Global Fund, GAVI, American Red Cross dan lainnya untuk membiayai program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Guna mendukung pembangunan kesehatan utamanya untuk upaya kesehatan masyarakat, tak bisa dihitung jumlah dana yang telah dikeluarkan masyarakat baik partisipasi perorangan maupun dalam bentuk dana kelompok formal ataupun informal.

Beberapa Kabupaten/Kota dalam 3 tahun terakhir telah menerapkan pelayanan gratis bagi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan rawat inap di kelas III RSUD setempat dengan dukungan APBD Kabupaten/Kota. Adapun jenis manfaat pelayanan serta limitasi pelayanan sangat bervariasi antar daerah. Sampai saat ini belum pernah ada evaluasi tentang kebijakan tersebut terkait derajat kesehatan masyarakat. Berkenaan dengan pembiayaan kesehatan

Berbasis Masyarakat (UKBM)”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian

- 3) Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya”
- 4) Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat,
- 5) Untuk mewujudkan tujuan ”Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan”, maka ditetapkan sasaran: Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan
- 6) Untuk mewujudkan tujuan ”Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya”
- 7) Untuk mewujudkan tujuan ”Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak

